

Kebijakan dan peta jalan (Roadmap) pembangunan pertanian dlm rangka ketahanan & swasembada pangan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=131023&lokasi=lokal>

Abstrak

Kajian kebijakan & peta jalan (Roadmap) pembangunan pertanian dalam rangka ketahanan & swasembada pangan bertujuan merumuskan dasar & arah kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka ketahanan pangan, utamanya dalam hal kemandirian pangan pokok. Kajian dilaksanakan pada tahun 2008, diawali dengan pertemuan tim untuk menyusun rencana kerja, diikuti dengan focus group discussion di Jakarta & seminar di Malang, Yogyakarta dan Bogor. Informasi & masukan yang diperoleh kemudian disusun menjadi laporan utuh yang meliputi kondisi & perkembangan pertanian & pangan, tantangan & kendala, serta strategi yang dapat ditempuh, untuk mewujudkan ketahanan pangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder mengenai produksi, konsumsi & distribusi pangan serta digunakan pula dokumen produk perundangan yang terkait dengan bidang ketahanan pangan. Ruang lingkup kajian meliputi: (1) Rangkaian seminar yang dilaksanakan di tiga kota (2) roundtable (focused group discussion), serta (3) kajian (desk studi/literature review). Hasil yang diharapkan adalah rekomendasi kebijakan dalam pembangunan pangan nasional. Kajian mengidentifikasi beberapa isu strategis ketahanan pangan di Indonesia beberapa tahun ke depan. Isu strategis tersebut diantaranya adalah (a) pengambilan keputusan yang lambat dalam mengantisipasi perubahan permintaan & penawaran produk pangan memperburuk kondisi krisis pangan global yang terjadi; (b) urbanisasi (yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi perkotaan yang lebih cepat), substitusi energi fosil dengan biofuel & perubahan iklim global menjadi variabel penentu ketahanan pangan global (hasil proyeksi badan & lembaga internasional); (c) perubahan ekonomi & demografi yang terjadi dalam kurun waktu 2009 - 2015 berdampak pada ketahanan pangan nasional; (d) terbatasnya kapasitas produksi pangan nasional karena terbatasnya lahan, menurunnya kualitas lahan, rusaknya prasarana, tidak terrealisasinya harga & persebaran (distribusi) optimal pupuk bersubsidi; (e) terhambatnya distribusi & akses pangan karena lambatnya pengembangan sarana & prasarana, kelembagaan sistem informasi, pembinaan standar kualitas; (f) adanya perubahan pola konsumsi beras & tepung terigu; (g) merabaknya kasus keracunan pangan; (h) kebijakan yang dikembangkan secara implisit menghendaki suatu sistem ketahanan pangan yang hierarkis mulai dari level rumah tangga, desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi & nasional. Hal itu menjadi masalah karena terkait dengan desentralisasi pembangunan yang terjadi di Indonesia, keterpaduan lintas sektor & lintas daerah, serta kondisi keragaman selera, budaya, kelembagaan & sumberdaya bahan pangan...